

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pertanian Organik

Seiring berkembangnya zaman, sektor pertanian pun mengalami peralihan dari sistem pertanian tradisional ke sistem pertanian organik. Pemerintah melalui Permentan Nomor 64 Tahun 2013 mengartikan sistem pertanian organik sebagai suatu sistem manajemen produksi guna meningkatkan dan mengembangkan kualitas hasil panen dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Hasil dari penerapan pertanian organik ialah produk pertanian yang lebih sehat dan ramah lingkungan serta aman dikonsumsi. Artinya, dalam sistem pertanian organik tidak digunakan pupuk maupun pestisida kimia. Penggunaan pupuk memang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman, namun pupuk juga bisa mengubah sifat fisikokimia dan biologi tanah. Penggunaan pupuk kimia secara terus menerus menyebabkan penurunan kandungan bahan organik tanah dan kualitas tanah pertanian (Pahalvi *et al.*, 2021). Kesuburan tanah yang berkurang akan mengakibatkan menurunnya produktivitas hasil panen.

Penerapan pertanian organik menjadi salah satu solusi guna memaksimalkan hasil panen sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, pertanian organik dapat mendorong kemandirian petani serta pembangunan ekonomi. Rasa mandiri pada petani muncul ketika petani mampu mengusahakan kegiatan pertaniannya secara organik dengan baik tanpa bergantung pada bahan kimia. Hal tersebut akan mendorong pertanian yang berkelanjutan. Saat ini

kesehatan menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan oleh masyarakat. Kesadaran akan bahaya kandungan zat kimia pada makanan menjadikan masyarakat lebih selektif memilih makanannya sehingga mereka cenderung memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan (Mayrowani, 2012). Dengan hal tersebut, peluang besar dengan menerapkan pertanian organik akan semakin terbuka sehingga apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan pendapatan petani dan nilai tambah produk pertanian. Penerapan pertanian organik yang berkelanjutan tentunya memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak seperti pemerintah khususnya bidang pertanian, produsen, peneliti, petani dan juga konsumen.

2.2. Usaha tani Padi Organik

Petani melakukan usaha tani untuk memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya agar dapat meningkatkan pendapatan petani. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 mendefinisikan usaha tani sebagai sebuah kegiatan petani dari proses budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, hingga pemasaran hasil panen. Usaha tani berorientasi pada hasil budidaya dan juga profit. Kini usaha tani organik mulai diterapkan pada tanaman pangan, buah-buahan hingga sayuran. Usaha tani terutama padi organik sendiri menjadi penting peranannya di Indonesia. Hal ini disebabkan padi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, usaha tani padi organik juga memberikan profit yang menjanjikan bagi petani serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Surdianto & Sutrisna (2015) mengungkapkan beberapa keuntungan yang didapatkan dengan

budidaya padi organik diantaranya: (1) kesehatan konsumen; (2) penggunaan pupuk organik yang mengembalikan kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan; dan (3) harga jual yang tinggi sehingga meningkatkan pendapatan petani.

Usaha tani padi organik juga bisa diintegrasikan dengan peternakan. Integrasi pertanian organik dengan ternak dapat menghemat biaya pupuk karena menggunakan limbah dari peternakan. Begitu juga dengan limbah jerami padi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dalam hal pengolahan dan pemasaran, petani perlu mengembangkan usaha taninya agar memperoleh sertifikasi organik dari lembaga terkait. Adanya label organik bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar produsen serta memberikan kepastian pada konsumen. Sertifikasi memiliki kekuatan dalam menjamin produk sesuai dengan standar sehingga memberikan keuntungan pada tingkat produsen dan juga konsumen (Mayrowani, 2012). Label organik yang diperoleh dari lembaga sertifikasi pada beras dapat membangun kepercayaan pada konsumen sehingga berdampak pada harga jual beras organik yang tinggi. Perubahan gaya hidup sehat yang berkembang saat ini juga membuka peluang besar bagi para produsen padi organik. Usaha tani padi organik menjadi pilihan alternatif petani untuk memperoleh keuntungan yang besar serta menjaga sistem pertanian yang berkelanjutan. Keberhasilan budidaya padi organik bergantung pada kemauan dan kemampuan petani dalam mengelola lahannya.

2.3. Program *UPLAND*

UPLAND berasal dari bahasa Inggris yang berarti dataran tinggi. Kata ini menjadi salah satu nama program pembangunan pertanian yang memang berfokus pada pengembangan pertanian di daerah dataran tinggi. Berdasarkan penelitian

yang dilakukan oleh Zeller *et al.* (2013) diketahui bahwa program *UPLAND* sudah dilakukan di beberapa negara Asia Tenggara yang mempunyai kondisi geografis pegunungan diantaranya adalah Vietnam dan Thailand. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengembangan pertanian terintegrasi di daerah tinggi berdampak dalam mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan produktivitas pertanian serta meminimalisir resiko ekonomi. Namun dalam hal tersebut diperlukan peran dari pembuat kebijakan yang mampu mengurangi dampak negatif kegiatan usaha tani terhadap lingkungan dan memastikan bahwa petani miskin mendapat manfaat dari adanya program tersebut.

Melalui penelitian tersebut diketahui bahwa program *UPLAND* mempunyai banyak dampak positif bagi petani dan juga negara. Program tersebut dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk mengembangkan pertanian mengingat kondisi geografis Indonesia terdapat banyak dataran tinggi yang tersebar di beberapa wilayah. Akhirnya pada tahun 2021, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjalankan program *UPLAND* yang secara komprehensif dilakukan di dataran tinggi dengan pengembangan komoditas unggulan termasuk padi sebagai tanaman pangan utama penunjang makanan pokok masyarakat Indonesia.

Berdasarkan buku pedoman pelaksanaan kegiatan *UPLAND* diketahui bahwa kegiatan *UPLAND* ini didanai dari pinjaman luar negeri dengan pemberi pinjaman adalah *Islamic Development Bank* (IsDB) dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) sebesar USD 120 juta. Sebagian dana tersebut yaitu sebesar USD 75,2 juta akan dihibahkan pada 14 kabupaten lokasi kegiatan

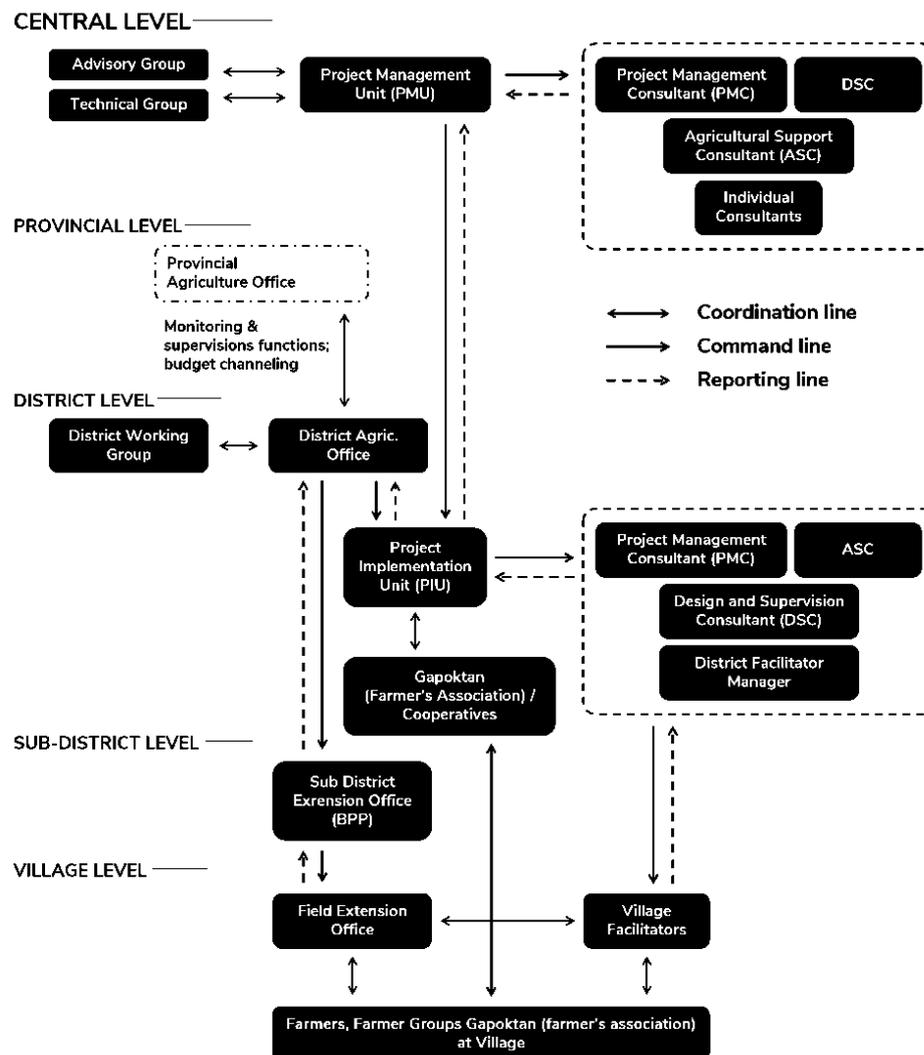
diantaranya Banjarnegara, Purbalingga, Magelang, Malang, Sumenep, Minahasa Selatan, Gorontalo, Lebak, Subang, Cirebon, Garut, Tasikmalaya, Lombok Timur, Sumbawa dan kabupaten lainnya. Dilansir dari website resmi *UPLAND project*, program *UPLAND* mempunyai tujuan yaitu mengurangi angka kemiskinan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan, serta menciptakan mata pencaharian petani yang berkelanjutan dan tangguh. Dalam pelaksanaan kegiatan *UPLAND* dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pula dukungan dari anggaran Pemerintah Indonesia sehingga diharapkan program *UPLAND* dapat berjalan secara efektif.

2.3.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan buku pedoman pelaksanaan *UPLAND*, organisasi pelaksana program *UPLAND* terdiri dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Unit kerja pelaksana kegiatan *UPLAND* di tingkat pusat adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian sebagai Unit Manajemen Proyek (*Project Management Unit/PMU*). Pada tingkat provinsi, tidak ada struktur khusus yang dibentuk namun PMU akan meminta Dinas Pertanian Provinsi untuk turut memberikan dukungan dan memantau Dinas Pertanian Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan *UPLAND*. Sedangkan unit kerja pelaksana di tingkat kabupaten adalah Dinas Pertanian Kabupaten yang merupakan Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit/PIU*). Dinas Pertanian Kabupaten berkoordinasi langsung dengan BPP yang akan mengkoordinasikan tenaga penyuluh. PIU membawahi dan mengkoordinasikan Poktan, Gapoktan, dan penerima manfaat kegiatan *UPLAND*. Dalam hal ini penerima manfaat program

UPLAND di Kecamatan Sawangan ialah petani padi organik beserta kelembagaan didalamnya yaitu kelompok tani dan Gabungan Tani Organik Sawangan (GATOS).

Struktur organisasi kegiatan *UPLAND* tersaji dalam Ilustrasi 1.



Ilustrasi 1. Struktur organisasi kegiatan *UPLAND*

Sumber: Website resmi *UPLAND*, 2020.

2.3.2. Komponen Kegiatan

Kementerian Pertanian melalui buku pedoman pelaksanaan *UPLAND* menjelaskan bahwa pelaksanaan *UPLAND* di beberapa wilayah Indonesia terdiri atas empat komponen kegiatan diantaranya:

1) **Pengembangan Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas dan Pembentukan Ketahanan Pertanian**

Dalam komponen ini hal yang menjadi fokus dalam pengembangan adalah:

a. Pengembangan lahan dan infrastruktur irigasi

Kegiatan pengembangan lahan meliputi kegiatan penyiapan lahan dan pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) yang disesuaikan dengan kondisi spesifik wilayah dan komoditas yang akan dikembangkan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mekanisme bantuan pemerintah (transfer uang).

b. Produksi dan pengelolaan pertanian

Peningkatan produksi dan pengelolaan pertanian dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, demplot, pelatihan, pengadaan sarana produksi pertanian, serta pengadaan alat mesin pertanian. Materi penyuluhan yang diberikan yaitu terkait *Good Agricultural Practices* (GAP). Demplot dilakukan dengan cara memberikan kegiatan percontohan dalam skala kecil untuk mendemonstrasikan semua aktivitas *on-farm* dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

Pada pelatihan diberikan pelatihan terkait teknis budidaya, Pengendalian Hama Terpadu (PHT), pengolahan pasca panen, pengolahan

dan pemasaran hasil pertanian serta pelatihan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Aktivitas pelatihan petani yang dapat dilakukan seperti antara lain sekolah lapang, *workshop*, seminar dan studi banding. Bantuan sarana produksi pertanian dapat meliputi bibit, benih, pestisida, pupuk dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan spesifik wilayah masing-masing. Sedangkan bantuan alsintan pra panen yang diberikan dapat berupa alat dalam budidaya seperti traktor R2, traktor R4, *transplanter*, *handsprayer*, *powersprayer* dan lainnya.

2) **Pengembangan agribisnis dan fasilitasi mata pencaharian**

Dalam komponen ini hal yang menjadi fokus dalam pengembangan adalah:

a. Pengembangan kelembagaan petani

Pengembangan kelembagaan petani bertujuan untuk mengembangkan kelompok tani/gabungan kelompok tani menjadi kelembagaan petani yang dapat mengelola aktivitas pertanian dari hulu sampai dengan hilir yang berorientasikan bisnis dalam bentuk korporasi petani. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan pembentukan korporasi petani yang berbadan hukum.

b. Dukungan infrastruktur pasca panen

Dukungan infrastruktur pasca panen bertujuan untuk membantu dalam kegiatan pengolahan hasil, pengemasan hasil produksi pertanian dan penyimpanan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengembangan komoditas di masing-masing daerah. Infrastruktur yang diberikan dapat berupa alat transportasi untuk mengangkut hasil produksi seperti motor roda

tiga, truk pengangkut, *pick-up*, *coolbox vehicle* serta pembangunan gudang, gedung dan prasarana fisik lainnya.

c. Penguatan jaringan pemasaran dan kemitraan

Penguatan ini dilakukan dengan pemberian aktivitas yang dapat membuka akses pasar bagi komoditas yang dihasilkan petani antara lain membangun kemitraan dengan pihak swasta, *off-taker*, pasar *e-commerce*, studi banding, mengikuti pameran baik skala nasional maupun internasional, sertifikasi komoditas, penyusunan *Business Plan*, dan lain sebagainya.

d. Akses kepada layanan keuangan

Akses kepada layanan keuangan bertujuan untuk mempermudah petani/poktan/gapoktan atau korporasi petani dalam mendapatkan pembiayaan pada skala mikro. Adapun ketentuan akses tersebut didasarkan pada perjanjian Kepala Daerah terkait dengan lembaga keuangan yang dipilih.

3) Penguatan sistem kelembagaan

Dalam komponen ini hal yang menjadi fokus dalam pengembangan adalah:

a) Penguatan kapasitas pegawai pemerintah

Kegiatan penguatan kapasitas pegawai pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai pemerintah baik di pusat maupun daerah di bidang pertanian. Jenis aktivitasnya diantaranya *training*,

workshop, FGD, Seminar, studi banding dan lainnya baik nasional maupun internasional.

b) Kolaborasi dengan penelitian

Kolaborasi dengan penelitian dilakukan untuk mensukseskan Kegiatan *UPLAND* terutama dari aspek teknis baik budidaya maupun pasca panen maka diperlukan dukungan data dan studi untuk topik spesifik sesuai kebutuhan pengembangan komoditas.

4) Manajemen proyek

Dalam komponen ini pengembangan manajemen proyek dilakukan dengan pendampingan tenaga ahli yang meliputi manajer fasilitator dan fasilitator desa serta manajemen operasional dengan cara pengadaan alat dan perlengkapan kantor dan pengadaan tenaga *supporting staff*.

2.3.3. Syarat Penerima Program

Menurut buku pedoman pelaksanaan *UPLAND* oleh Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa kriteria petani/peternak dan lokasi penerima manfaat program adalah sebagai berikut:

A. Kriteria petani/peternak

Petani/peternak yang terlibat di dalam Kegiatan *UPLAND* merupakan petani/peternak kecil di lokasi pengembangan komoditas kegiatan *UPLAND* yang telah memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Petani/Peternak yang aktif melakukan usaha tani dan tergabung dalam Kelompok Tani/Kelompok Ternak/Gabungan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Ternak dan/atau P3A/GP3A dan bersifat inklusif.

2. Kelembagaan petani penerima manfaat sudah terdaftar dalam Simluhtan atau sudah mendapatkan legalisasi dari pemerintah daerah setempat dan diutamakan berbadan hukum.
3. Calon penerima bantuan untuk komoditas domba/kambing diutamakan kelompok yang sebagian atau seluruh anggota kelompoknya memiliki pengalaman beternak (pernah dan/ sedang memelihara ternak)
4. Korporasi petani penerima manfaat dapat berupa KUBE, BUMP, BLUD dan harus sudah berbadan hukum
5. Calon penerima manfaat tidak menerima jenis bantuan/dukungan yang sama pada lokasi kegiatan *UPLAND* dari sumber pendanaan lain pada periode pelaksanaan kegiatan
6. Calon penerima manfaat ditetapkan di dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setempat berdasarkan hasil verifikasi dari tim teknis kabupaten dan rekomendasi dari fasilitator desa/penyuluh/KCD, dan/atau pembina kelompok masyarakat lainnya
7. Calon penerima manfaat bersedia memenuhi kewajiban kelengkapan administrasi dan mengarsipkannya, serta melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dan hasil bantuan/dukungan sesuai aturan yang berlaku
8. Calon penerima manfaat bersedia/sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan (Pusat), Petunjuk Teknis (Kabupaten), dan ketentuan lainnya yang telah disepakati

9. Calon penerima manfaat bersedia berkontribusi (*sharing*) untuk bantuan prasarana dan sarana pertanian yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan usaha taninya
10. Calon penerima manfaat bersedia berkontribusi dalam penyediaan lahan (tidak menuntut ganti rugi, dibuktikan dengan pernyataan tertulis) untuk pembangunan prasarana dan sarana termasuk pembangunan irigasi, pembangunan gudang/Gedung dan prasarana fisik lainnya yang selanjutnya akan diperhitungkan sebagai kontribusi penerima manfaat kegiatan.

B. Kriteria lokasi

Kriteria lokasi kegiatan didasarkan kepada:

1. Lokasi yang akan dikembangkan sesuai dengan aspek kesesuaian lahan, dan/atau kondisi eksisting budidaya di lokasi yang akan dikembangkan;
2. Lokasi lahan tidak akan dialihfungsikan;
3. Status lahan jelas kepemilikannya, tidak dalam sengketa, dan berada pada lahan yang statusnya menurut peraturan yang ada boleh dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian;
4. Lokasi dilengkapi dengan peta geospasial lokasi dan lahan dalam format *shapefile* (.shp);
5. Tidak ada ganti rugi terhadap lahan yang digunakan untuk pembangunan prasarana dan sarana;
6. Lokasi untuk pengembangan peternakan berada di wilayah lokasi pengembangan ternak dan terdapat sumber pakan ternak.

2.3.4. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan. Suatu program pertanian dapat dikatakan berhasil ketika sudah mencapai target yang diinginkan. Program *UPLAND* sendiri memfokuskan pada pengembangan pertanian dari hulu ke hilir yang berdasar pada sistem agribisnis sehingga petani sebagai pelaku usaha tani dan juga kelembagaan petani didalamnya sangat menentukan keberhasilan program *UPLAND*. Kelembagaan petani di pedesaan menentukan tercapainya tujuan program karena berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur, dan pasar, dan adopsi inovasi pertanian (Anantanyu, 2011). Berdasarkan buku pedoman pelaksanaan kegiatan *UPLAND*, keberhasilan kegiatan *UPLAND* dapat diukur dengan tiga pendekatan yaitu:

a. Keluaran (*output*)

Output dalam sebuah program adalah sesuatu yang dihasilkan baik berupa barang atau jasa yang disediakan kepada penerima manfaat proyek.

Output dalam proyek ini bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki petani serta meningkatkan produksi komoditas. *Output* proyek *UPLAND* mengacu pada komponen 1 hingga 3 (**Poin 2.3.2**).

Output dalam komponen 1 (Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas dan pembentukan ketahanan pertanian) meliputi pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur fisik serta pemberian dukungan bantuan teknis dan alsintan untuk produksi secara berkelanjutan. Infrastruktur fisik yang menjadi fokus program *UPLAND* adalah

penyelenggaraan irigasi yang lebih baik. Hal ini meliputi jalan usaha tani, terasering, dan sistem irigasi. Bantuan teknis yang dapat diberikan yaitu berupa penyuluhan/demonstrasi/sejenisnya, jumlah penyuluh yang memadai dan kompeten, serta bantuan saprodi dan alsintan kepada seluruh petani penerima manfaat proyek. Adapun materi penyuluhan ataupun pelatihan yang diberikan penyuluh sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimana penyuluh memberikan pendampingan agar petani mampu melakukan : (a) tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik; (b) analisis kelayakan usaha; dan (c) kemitraan dengan Pelaku Usaha.

Output dalam komponen 2 (Pengembangan agribisnis dan fasilitasi mata pencaharian) meliputi terdukungnya usaha pasca panen petani, dilaksanakannya pelatihan manajemen usaha dan teknis, meningkatnya keberadaan komoditas yang bermutu di pasaran, serta meningkatnya akses kredit untuk usaha tani. Untuk mendukung usaha pasca panen petani akan diberikan fasilitas pemasaran, pengolahan atau penyimpanan. Kemudian dilakukan pula pelatihan teknis terkait teknik pasca panen/pengolahan hasil dan atau pengelolaan usaha. Usaha untuk meningkatkan nilai komoditas dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan pihak lain, dilaksanakannya kegiatan temu usaha antara petani dengan pihak swasta serta melaksanakan kesepakatan bersama. Adapun usaha untuk meningkatkan akses kredit usaha tani dilakukan dengan memberi kemudahan jumlah pinjaman yang

diberikan kepada petani/kelompok usaha melalui jalur kredit yang disediakan *UPLAND*.

Output dalam komponen 3 (Penguatan sistem kelembagaan) berupa pemberian kursus pelatihan terkait komoditas yang direncanakan kepada para penyuluh beserta jumlah penyuluh yang menerima pelatihan tersebut, pemberian bimbingan yang intensif kepada PIU (*Project Implementation Unit*) yang berada di tingkat Kabupaten terkait mekanisme *on granting* dan pengadaan barang dan jasa, serta topik dan jumlah kajian teknologi sebagai bentuk kolaborasi dengan penelitian. *Output* diatas dapat dilihat melalui peran penyuluh dalam memberikan pendampingan kepada petani sebagai penerima manfaat program *UPLAND*. Abdullah *et al.* (2021) menyatakan bahwa penyuluh dapat meningkatkan partisipasi petani melalui perannya sebagai motivator, inovator, fasilitator dan komunikator.

b. Hasil (*outcome*)

Outcome adalah pengaruh dari *output* terhadap perubahan profil penerima manfaat proyek yang dapat berupa produktivitas usaha, kapasitas, maupun lainnya. *Outcome* akan menggambarkan sesuai tidaknya keluaran dari kegiatan proyek dalam memperbaiki penghidupan petani. *Outcome* disebut juga hasil antara yang diharapkan akan membawa perubahan pada hasil ahir proyek. *Outcome* proyek *UPLAND* mengacu pada komponen 1 hingga 3 (**Poin 2.3.2**).

Outcome pada komponen 1 (Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas dan pembentukan ketahanan pertanian) yaitu

meningkatnya kapasitas kelompok miskin dalam berproduksi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penerima manfaat yang mampu mengadopsi teknologi yang diberikan yaitu sarana produksi dan praktik produksi yang berkelanjutan serta meningkatnya produksi komoditas petani.

Outcome pada komponen 2 (Pengembangan agribisnis dan fasilitasi mata pencaharian) yaitu meningkatnya keuntungan dan kemudahan petani kelompok miskin yang diperoleh dari usaha pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari kepuasan petani terhadap peningkatan akses pada fasilitas pemasaran, pengolahan dan permodalan serta manfaat yang dirasakan petani terhadap peningkatan keuntungan dan penjualan.

Outcome pada komponen 3 (Penguatan sistem kelembagaan) yaitu meningkatnya pelaksanaan *UPLAND* dan kajian yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan PIU yang mampu melaksanakan prosedur *on granting* dan target pengadaan sesuai jadwal.

c. Dampak (*impact*)

Dampak yang dimaksud adalah pengaruh jangka panjang dari suatu proyek dan terkadang disebut dengan hasil akhir misalnya menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Pada program *UPLAND* ini dampak yang diharapkan ialah meningkatnya pendapatan petani, ketahanan pangan dan penghidupan petani miskin di lokasi *UPLAND*. Dampak tersebut menggambarkan tujuan akhir dari adanya program yaitu mencapai kesejahteraan petani. Pendapatan menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan petani. Pendapatan merupakan penghasilan petani setelah

berusaha tani yang dikurangi dengan biaya produksi. Pendapatan dapat menggambarkan produktivitas dari usaha tani. Namun, peningkatan produktivitas usaha tani belum tentu menjamin pendapatan yang tinggi karena hal tersebut dipengaruhi oleh harga yang diterima petani dan juga besarnya biaya input suatu usaha tani (Rustam, 2014).

Dampak lainnya yang diharapkan dengan adanya program pertanian ialah meningkatnya ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai suatu keadaan dimana suatu negara hingga perseorangan didalamnya merasa terpenuhi kebutuhan pangannya baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, kehidupan masyarakat terutama petani miskin juga diharapkan mengalami peningkatan setelah implementasi program pertanian sehingga mereka tidak merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia (*basic needs*). Hal inilah yang disebut dengan taraf hidup. Soedjatmiko dalam Bungkaes *et al.* (2013) mengatakan bahwa komponen yang termasuk dalam kebutuhan dasar manusia diantaranya makanan, lapangan kerja, kesehatan, perumahan, pendidikan, komunikasi, kebudayaan, penelitian dan teknologi, energi, hukum serta dinamika politik dan implikasi ideologi.

2.4. Efektivitas

Efektivitas merupakan gambaran antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas seringkali berhubungan dengan keberhasilan program yang mana dapat dilihat dari perbedaan *output* dengan tujuan. Mahmudi dalam Tamaheang (2020) mengemukakan bahwa semakin besar kontribusi (sumbangan)

output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif pula organisasi, program ataupun kegiatan.

Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai sehingga untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program diperlukan adanya ukuran-ukuran efektivitas. Setiap program tentunya memiliki indikator capaian atau target pelaksanaan dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut bertujuan agar program yang dijalankan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Rasio antara target dengan realisasi program inilah yang menggambarkan efektivitas. Sundayana (2018) juga menuturkan bahwa kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai disebut efektivitas.

Variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas program *UPLAND* dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sriati *et al* (2017). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa efektivitas Gapoktan dalam Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dapat dilihat dari indikator hasil (*outcome*), indikator manfaat (*benefit*), dan indikator dampak (*impact*). Indikator tersebut berasal dari buku pedoman LDPM. Selanjutnya menurut buku pedoman pelaksanaan kegiatan *UPLAND* terdapat tiga pendekatan untuk mengetahui efektivitas program diantaranya keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Ketiga indikator tersebut telah dijelaskan pada **Poin 2.3.2**. Melalui indikator tersebut dapat diketahui bahwa semakin banyak indikator keberhasilan yang tercapai, maka efektivitas program juga akan

meningkat. Dengan adanya efektivitas suatu organisasi atau kelompok dapat dengan mudah mengevaluasi keberjalanan program.

2.5. Partisipasi

2.5.1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan anggota dalam setiap kegiatan untuk mencapai tujuan kelompok. Partisipasi anggota merupakan kesediaan anggota kelompok dalam mencurahkan usahanya yang menunjang kepentingan kelompok baik dalam hal pemberian ide, pemikiran, waktu, ataupun materi (Prasetyo *et al.*, 2020). Peningkatan partisipasi anggota kelembagaan petani menjadi salah satu usaha dalam mempertahankan kehidupan suatu kelompok. Usaha yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kehidupan kelompok ialah meningkatkan partisipasi anggota kelompok, kegiatan, komunikasi dan koordinasi, fasilitas, sosialisasi dan menciptakan norma (Kelbulan *et al.*, 2018). Tingkat partisipasi juga akan mempengaruhi berhasil tidaknya pencapaian tujuan. Misalnya saja ketika terdapat proyek pertanian secara kelompok, partisipasi petani sangat diperlukan guna mendukung keberjalanan program untuk meraih satu demi satu target program. Menurut Fitri & Suhifatullah (2013), partisipasi anggota merupakan tolok ukur keberhasilan setiap program yang ada sehingga sangat penting untuk menunjang keberhasilan program kelompok.

Partisipasi anggota akan mendorong keberhasilan program namun keaktifan dari masing-masing anggota akan mempengaruhi cepat tidaknya suatu kelompok dapat mencapai tujuan. Hal inilah yang disebut dengan efektivitas. Semakin efektif

pelaksanaan program maka akan semakin optimal pula manfaat program yang dirasakan oleh petani. Partisipasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kapasitas dan efektivitas serta mendorong timbulnya inisiatif dan pengendalian (Nazaruddin & Anwarudin, 2019). Tidak hanya pada pencapaian program kelompok saja, partisipasi petani sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui proyek pembangunan pertanian seperti halnya *UPLAND*. Hasil studi Bank Dunia terhadap proyek pembangunan pertanian menunjukkan bahwa memberikan perhatian pada pembangunan kelembagaan dan partisipasi masyarakat akan mendorong keberhasilan proyek secara berkelanjutan (Cernea dalam Yumi *et al.*, 2012).

2.5.2. Dimensi Partisipasi

Partisipasi anggota kelembagaan petani dapat diketahui dengan melihat bagaimana cara anggota ikut serta dalam setiap kegiatan kelompoknya. Mardikanto dalam Sandyatma (2012) mengemukakan bahwa partisipasi adalah suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela dalam keseluruhan proses kegiatan sebagai berikut:

a) Perencanaan

Perencanaan dalam setiap kegiatan adalah hal yang penting untuk menentukan target yang diinginkan sehingga diketahui sejauh mana hasil pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan awal. Partisipasi dalam tahap perencanaan dapat berupa kehadiran petani dalam perencanaan dan rapat rutin

kelompok serta memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam perencanaan.

Kehadiran anggota merupakan bentuk keterlibatan pada setiap kegiatan kelompok yang mana dapat dilihat secara langsung. Frekuensi kehadiran menggambarkan besarnya antusias anggota terhadap kegiatan kelompok. Jumlah kehadiran anggota disetiap pertemuan menunjukkan antusias anggota untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok (Tri *et al.*, 2021). Semakin besar jumlah kehadiran anggota maka akan terlihat bahwa antusias anggota juga tinggi. Hal ini disebabkan seorang anggota untuk dapat hadir juga memerlukan tenaga serta waktunya demi berpartisipasi dalam kegiatan kelompok.

Pemberian informasi kepada kelompok tani merupakan bentuk partisipasi anggota dalam memberikan informasi yang dapat mendukung perencanaan kegiatan kelompok. Hal yang dapat dilakukan anggota untuk mendukung kegiatan kelompok ataupun program dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya memberikan dukungan politik, memberikan informasi serta menyumbangkan sumber dayanya (Askar, 2019). Bentuk lainnya dari partisipasi adalah pengajuan pertanyaan. Seorang anggota yang mampu mengajukan pertanyaan jika ia merasa kurang paham akan informasi yang diterimanya maka hal tersebut menandakan bahwa dirinya berpartisipasi atas kehendak sendiri dengan tujuan ingin mendapatkan informasi untuk kemajuan dirinya. Van Den Ban dan Hawkin dalam Koampa *et al.* (2015) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat muncul karena kehendak dari pribadi yang dilandasi oleh adanya dorongan dari hati nurani sendiri. Partisipasi atas kesadaran tersebut merupakan bentuk

partisipasi yang sesungguhnya sangat diharapkan dapat berkembang dalam masyarakat guna keberhasilan kegiatan.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan merupakan bentuk realisasi dari perencanaan yang telah dibuat. Hal ini akan menentukan keberhasilan program. Partisipasi anggota dalam pelaksanaan suatu program merupakan tahap penting untuk mencapai keberhasilan, karena pelaksanaan merupakan tahap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Jalieli & Sadono, 2013). Partisipasi dalam tahap pelaksanaan dapat berupa melakukan usaha tani dengan tepat, mengikuti pelatihan dan penyuluhan, memberikan sumbangan/iuran kepada kelompok tani, serta keterlibatan langsung terhadap kegiatan kelompok.

Pelaksanaan usaha tani merupakan kegiatan dasar seorang petani. Setelah adanya program, pelaksanaan usaha tani diharapkan dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan bantuan alsintan dan saprodi yang telah diberikan. Hal tersebut disebutkan juga pada penelitian Winata & Yuliana (2012) yang mengukur partisipasi pada tahap pelaksanaan dengan melihat petani yang menanam tanaman pokok dan tanaman semusim pada lahan garapannya. Melalui program *UPLAND* diperlukan pula partisipasi langsung petani dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

Keterlibatan langsung anggota pada setiap kegiatan kelompok merupakan bentuk nyata partisipasi dengan mencurahkan ide, tenaga dan waktu demi kepentingan bersama. Keterlibatan langsung aktif anggota dalam situasi kelompok menggambarkan bahwa anggota telah terdorong untuk memberikan sumbangan

kepada kelompok dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan kelompok (Maleba *et al.*, 2015). Oleh karena itu, keterlibatan langsung anggota sangat penting bagi keberjalanan dan keberhasilan kegiatan kelompok sehingga diharapkan keterlibatan langsung anggota terus berada dalam kondisi baik. Partisipasi langsung anggota dalam kelompok akan memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan bersosialisasi dan lain sebagainya. Keterlibatan langsung petani dalam program *UPLAND* diantaranya ikut serta dalam pembangunan sistem irigasi dan jalan usaha tani, penyuluhan dan pelatihan, serta pembangunan fasilitas pasca panen dan gedung bersama.

Setelah pembangunan fasilitas pasca panen selesai dilakukan, perlu adanya partisipasi petani dalam menjual gabah/berasnya kepada Gapoktan melalui fasilitas pasca panen tersebut. Hal itu akan meningkatkan pendapatan petani dengan cara tidak menjualnya ke tengkulak serta menjadikan nilai komoditas yang lebih tinggi di pasaran. Partisipasi dalam membayar iuran secara rutin juga termasuk keterlibatan langsung dalam bentuk uang guna pengembangan kelompok.

c) Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan sebuah program selesai. Jalieli & Sadono (2013) menuturkan bahwa partisipasi petani dalam tahap evaluasi merupakan keikutsertaan responden dalam memantau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh kelompok tani. Hal tersebut dapat dilakukan pada saat pertemuan maupun diluar pertemuan dengan membahas sejauh mana program yang berjalan telah sesuai dan mencapai tujuan yang diharapkan. Partisipasi dalam tahap ini diantaranya anggota yang memberikan penilaian atau masukan terhadap kinerja

ketua dan pengurus Poktan/Gapoktan serta penyuluh sebagai pendamping kegiatan *UPLAND* agar usaha Gapoktan dapat berkembang. Penyampaian pendapat dan respon terhadap permasalahan yang ada dalam kelompok merupakan wujud dari partisipasi anggota (Effendy & Thopan, 2020).

Selain itu, petani dapat ikut serta untuk mengingatkan kepada sesama anggota untuk hadir dalam pertemuan dan menjual gabah/berasnya ke fasilitas pasca panen bukan ke tengkulak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandyatma (2012) bahwa keikutsertaan petani dalam tahap pemantauan dan evaluasi dapat diwujudkan dengan memberi masukan kepada pengurus, membantu kelompok untuk mengingatkan anggota mematuhi kebijakan kelompok, serta hadir dalam rapat tahunan Gapoktan. Bentuk partisipasi tersebut menandakan bahwa petani telah mengamati selama pelaksanaan program berlangsung dan ingin pelaksanaan program berjalan lebih baik.

d) Pemanfaatan hasil

Partisipasi anggota dalam tahap pemanfaatan hasil merupakan tingkat keterlibatan anggota kelompok dalam memanfaatkan sarana dan prasarana serta hasil yang diperoleh dari kegiatan kelompok. Hasil yang diperoleh bisa berupa sarana dan prasarana yang diberikan dalam program maupun hasil yang ditimbulkan setelah program *UPLAND* berakhir. Hasil dari program *UPLAND* meliputi fasilitas pengolahan bersama/koperasi, jalan usaha tani, terasering, sistem irigasi, alsintan, dan saprodi. Adanya bantuan tersebut menyebabkan timbulnya rasa tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan bantuan tersebut.

Rasa tanggung jawab anggota merupakan bentuk partisipasi demi kepentingan kelompok. Begitu juga pada kelembagaan petani dimana peraturan-peraturan dan beban yang telah ditetapkan akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi. Rasa tanggung jawab sangat penting dalam suatu kelompok sehingga perlu ditingkatkan dengan pemberian tanggungan yang lebih besar kepada anggota yang mana hal tersebut akan meningkatkan pula partisipasi aktif anggota dalam kelompok (Damanik, 2013). Adanya rasa tanggung jawab bisa timbul karena petani merasakan adanya manfaat dari pemberian materi maupun bantuan program sehingga ingin membagikannya kepada petani lainnya karena ingin kelompoknya menjadi lebih baik.

Kemampuan dalam menyebarkan informasi menjadi bentuk partisipasi yang penting dalam penyebaran dan pertukaran informasi pada petani. Meskipun tidak semua petani mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan secara langsung, namun partisipasi dan peran petani dalam menyebarluaskan informasi yang telah diterimanya kepada petani lainnya dibutuhkan guna keberhasilan sebuah program. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendrawati *et al.* (2014) bahwasanya penerimaan informasi melalui rekan sesama petani yang mana petani tersebut berperan sebagai *early adopter* informasi terkait inovasi di bidang pertanian sangat membantu berlangsungnya kegiatan karena keterbukaan akses informasi. Dengan hal tersebut diharapkan para petani mampu menyebarluaskan informasi manfaat dari kegiatan *UPLAND* kepada sesama anggota yang pasif atau petani yang belum bergabung dalam Gapoktan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Teknik analisis	Hasil penelitian
1.	Partisipasi Petani dan Efektivitas Gapoktan dalam Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin (Sriati <i>et al.</i> , 2017)	1. Partisipasi 2. Efektivitas	Analisis deskriptif dan analisis korelasi	Partisipasi petani dalam program LDPM tergolong sedang, efektivitas Gapoktan tergolong tinggi dan terdapat hubungan positif signifikan antara partisipasi petani dengan efektivitas Gapoktan dalam program LDPM
2.	Partisipasi anggota kelompok tani dalam menunjang efektivitas gapoktan pada kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat di Kabupaten Bogor (Sandyatma, 2012)	1. Partisipasi 2. Usia 3. Pendapatan 4. Intensitas menerima sosialisasi kegiatan 5. Motivasi	Kuantitatif (analisis regresi linier berganda) dan kualitatif	Tingkat partisipasi anggota Gapoktan pada Kegiatan Penguatan-LDPM adalah rendah. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi anggota adalah usia, pendapatan, motivasi, dan intensitas menerima sosialisasi kegiatan. Partisipasi anggota Gapoktan pada Kegiatan Penguatan-LDPM berpengaruh positif terhadap efektivitas Gapoktan.

Tabel 2 (Lanjutan)

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Teknik analisis	Hasil penelitian
3.	Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) Tahun 2014 Terhadap Tingkat Keberdayaan Petani Garam Rakyat di Kecamatan Kaliori. (Amanda & Buchori, 2015)	1. Efektivitas 2. Keberdayaan	Analisis deskriptif dan analisis korelasi	Pelaksanaan program PUGAR 2014 cukup berhasil sedangkan keberdayaan petani dinilai berdaya. Hasil analisis korelasi menunjukkan adanya korelasi positif antara efektivitas dengan tingkat keberdayaan atau mempunyai hubungan searah, namun cenderung rendah.